



• KOPDES MERAH PUTIH

## Bisnis Usaha Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat

TEGALREJO—Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didorong untuk memulai aktivitas usahanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Pembiayaan bisa dengan simpanan anggota atau utang dengan proposal bisnis.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) DIY, Sri Nurkatsiwi, menjelaskan semua KDMP ditargetkan sudah memulai aktivitas usahanya pada Oktober 2025. "Sebelumnya 438 koperasi sudah berbadan hukum, lalu ada lima *mock up*. Pada Oktober mendarat harapannya semua KDMP sudah memulai aktivitas bisnis," ujarnya. Senin (4/8).

Saat ini Pemda DIY bersama lembaga terkait tengah memetakan KDMP untuk mengetahui profil KDMP di DIY, terutama terkait dengan sumber daya manusia (SDM), kelembagaan dan potensi yang harus dikembangkan. "Enam gerai tidak harus semuanya langsung jalan, tapi bertahap," katanya.

Ia mencontohkan KDMP di Kelurahan Purwokinananti, kamantran Pakualaman, Kota Jogja. Di kelurahan tersebut banyak pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di masyarakat, maka itu yang dijalankan. Sedangkan kalau secara umum, di DIY kebanyakan yang didorong adalah ketahanan pangan. "Untuk sektor pertanian, yang perlu diperkuat yakni pengadaan sarana produksi pertanian (saprodi)," katanya.

KDMP juga harus menjawab apa yang menjadi permasalahan atau kebutuhan di wilayah masing-masing. Ia mencontohkan jika masyarakat kesulitan dalam mendapatkan gas melon sesuai harga eceran tertinggi (HET), maka KDMP harus diarahkan ke sektor gas.

"Harapannya koperasi menjadi agen penyalur gas bersubsidi dengan harga HET. Artinya, masyarakat bisa mendapatkan gas dengan mudah dan murah. Di wilayah pertanian, koperasi bisa menjadi agen penyalur pupuk, petani fokus di produksi dengan akses pupuk mudah dan murah," paparnya.

Untuk pembiayaan kegiatan, KDMP mengelola secara mandiri koperasi. Pemda DIY sebatas memfasilitasi peningkatan kompetensi, pembinaan manajemen dan pendampingan rencana bisnis. "Mereka mengimplementasi menjadi ketugasan koperasi bisa dari simpanan wajib simpanan pokok anggota," katanya.

Pembiayaan juga bisa dilakukan melalui skema utang, dengan pengajuan proposal bisnis ke lembaga pembiayaan. "Berdasarkan PMK [Peraturan Menteri Keuangan] No. 49/2025, kalau mau pinjam harus ada tanda tangan lurah, bupati/wali kota. Jadi semuanya transparan," ujarnya.

Karena merupakan program baru, maka Dinkop UKM DIY masih terus berupaya menyatukan visi dan tujuan pengurus dan anggota KDMP agar memiliki pemahaman yang sama. "kami melakukan sosialisasi untuk menyatukan pemahaman bersama, karena keragamannya banyak sekali dari sisi usia, pendidikan, ekonomi, semua berpengaruh," kata dia. (Lugas Suburkulu)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005